**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Konsep Pendidikan Nonformal**
3. Pengertian Pendidikan Nonformal

Menurut Coombs (Kamil, 2011: 14) bahwa:

Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan pendidikan yang teorganisasi, diselenggarakan di luar pendidikan persekolahan, diselenggarakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar didalam mencapai tujuan belajar.

Marzuki (2012: 137) mengemukakan bahwa:

Pendidikan nonformal adalah proses belajar yang terjadi secara terorganisasikan di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar yang dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan nonformal dalam proses penyelenggaraannya memiliki suatu sistem yang terlembagakan, yang didalamnya terkandung makna bahwa setiap pengembangan pendidikan nonformal perlu perencanaan program yang matang, melalui kurikulum, isi program, sarana, prasarana, sasaran didik, sumber belajar, serta faktor-faktor yang satu sama lain tak dapat dipisahkan dalam bentuk pendidikan nonformal.

1. Karakteristik Program Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal

Berdasarkan model yang digunakan Paulston (Sudjana, 2004: 29), dapat dibedakan karakteristik pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Tabel 2.1 Perbedaan Karakteristik Program-Program

|  |  |
| --- | --- |
| **Program Pendidikan**  **Formal** | **Program Pendidikan**  **Nonformal** |
| 1. Tujuan | |
| 1. Jangka panjang dan umum 2. Orientasi pada pemilikan ijazah | 1. Jangka panjang dan khusus 2. Kurang menekankan pentingnya ijazah |
| 1. Waktu | |
| 1. Relatif lama 2. Berorientasi ke masa depan 3. Menggunakan waktu penuh dan terus menerus | 1. Relatif singkat 2. Menekankan masa sekarang 3. Menggunakan waktu tidak terus menerus |
| 1. Isi Program | |
| 1. Kurikulum disusun secara terpusat dan seragam berdasarkan kepentingan | 1. Kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik |
| 1. Proses Pembelajaran | |
| 1. Dipusatkan dilingkungan sekolah 2. Terlepas dari lingkungan kehidupan peserta didik di masyarakat 3. Struktur program yang ketat 4. Berpusat pada pendidiki 5. Pengerahan daya dukung secara maksimal | 1. Dipusatkan dilingkungan masyarakat dan lembaga 2. Berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat 3. Struktur program yang luwes 4. Berpusat pada peserta didik 5. Pengehematan sumber- sumber yang tersedia |
| 1. Pengendalian | |
| 1. Dilakukan oleh pengelola ditingkat yang lebih tinggi 2. Pendekatan kekuasaan | 1. Dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik 2. Pendekatan demokratis |

Berdasarkan model tersebut, informasi dalam tabel tersebut memuat dua kelompok ciri yang belawanan. Bagian sebelah kiri menggambarkan karakteristik pendidikan formal dan sebelah kanan menggambarkan karakteristik pendidikan nonformal.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pendidikan nonformal dan pendidikan formal adalah dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal memiliki karakteristik sasaran didik tersendiri, dimana karakter tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan sasaran didik pendidikan formal.

1. Komponen, Proses dan Tujuan Pendidikan Nonformal

Sebagaimana halnya pendidikan formal, pendidikan nonformal pun mempunyai komponen, proses dan tujuan. Perbedaan komponennya, terutama pada program pendidikanyang terkait dengan dunia kerja, dunia usaha dan program yang diintregasikan ke dalam gerakan pembangunan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sudjana (2004: 34) yang menggambarkan hubungan fungsional antara komponen, proses dan tujuan pendidikan nonformal sebagai berikut:

Masukan Lingkungan

Pengaruh

Keluaran

Proses

Masukan Mentah

Masukan Sarana

Masukan Lain

Masukan Lingkungan

Gambar 2.1 Hubungan Fungsional antara Komponen, Proses dan Tujuan Pendidikan Nonformal.

Masukan Lingkungan terdiri atas unsur-unsur lingkungan yang menunjang atau mendorong berjalannya program pendidikan nonformal. Unsur-unsur ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sosial seperti teman bergaul atau teman Masukan Lingkungan bekerja, kelompok sosial, komunitas, serta lingkungan alam mencakup sumber daya hayati, sumber daya non hayati dan sumber daya buatan.

Masukan sarana meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang memungkinkan bagi seseorang atau kelompok dapat melakukan kegiatan pembelajaran kedalam masukan ini termasuk, kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan lainnya, perpustakaan, fasilitas dan alat, biaya dan pengelolaan program.

Masukan mentah yaitu peserta didik dengan berbagai ciri yang dimilikinya, yaitu karakteristik internal (fisik, psikis dan fungsional) dan eksternalnya (keluarga, ekonomi, pendidikan, status sosial, teman bergaul dan bekerja, biaya dan sarana belajar, serta cara dan kebiasaan belajar di masyarakat.

Proses menyangkut interaksi edukasi antara masukan sarana, terutama pendidik dengan masukan mentah yaitu peserta didik (warga belajar). Proses ini terdiri atas kegiatan pembelajaran, bimbingan penyuluhan atau pelatihan serta evaluasi.

Keluaran merupakan tujuan antara pendidikan nonformal. Keluaran mencakup kuantitas lulusan disertai kualitas perubahan perilaku yang didapat melalui kegiatan pembelajaran. Perubahan perilaku ini mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan kebutuhan belajar yang mereka perlukan.

1. Keunggulan dan Kelemahan Pendidikan Nonformal

Kehadiran pendidikan nonformal, terutama di negara-negara sedang berkembang, dipandang telah memberikan berbagai manfaat. Sudjana (2004: 39) berpendapat bahwa pendidikan nonformal memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan, yaitu:

1. Keunggulan: a) Biaya pendidikan nonformal lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digunakan dalam pendidikan formal, b) Program pendidikan nonformal lebih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, c) Pendidikan nonformal memiliki program yang lebih fleksibel.
2. Kelemahan: a) Kurangnya koordinasi, disebabkan oleh keragaman dan luasnya program yang diselenggarakan oleh berbagai piha, b) Tenaga pendidik atau sumber belajar professional masih kurang, c) Motivasi belajar peserta didik relative rendah
3. Progran-program Pendidikan Nonformal

Nurlaily (Abdulhak, 2012: 52) menyatakan jenis pendidikan nonformal ada delapan, yaitu:

1. Pendidikan kecakapan hidup
2. Pendidikan anak usia dini
3. Pendidikan kepemudaan
4. Pendidikan pemberdayaan perempuan
5. Pendidikan keaksaraan
6. Pendidikn ketrampilan dan pelatihan kerja
7. Pendidikan kesetaraan

Sedangkan satuan pendidikan nonformal menurut Nurlaily (Abdulhak, 2012: 52) ada enam yaitu: “1) Lembaga kursus, 2) Lembaga pelatihan, 3) Kelompok belajar, 4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 5) Majelis taklim, 6) Satuan pendidikan sejenis”. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Lembaga kursus

Lembaga kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

1. Lembaga pelatihan

Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi dimana peserta pelatihan biasanya tingkat nonmanagerial dengan tujuan mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis serta tujuan tertentu.

Admodiwirio (Abdulhak, 2012: 56) menjelaskan bahwa jenis-jenis pelatihan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Latihan prajabatan yaitu pelatihan yang diperuntukan bagi siswa, mahasiswa/I yang mendapat ikatan dinas dan calon pegawai (tugas belajar, CPNS)
2. Latihan dalam jabatan yaitu latihan yang diperuntukan bagi seseorang yang telah atau yang akan menduduki jabatan tertentu. Termasuk didalamnya adalah pelatihan structural, pelatihan fungsional dan pelatihan teknis.
3. Kelompok belajar

Kelompok belajar adalah program kelompok belajar yang dijalankan untuk mengejar ketertinggalan, bersifat bekerja dalam belajar dan menggunakan wadah kelompok belajar. Program kelompok belajar dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Kelompok belajar fungsional:

Keaksaraan fungsional, kelompok belajar usaha, kelompok pemuda produktif pedesaan, kelompok pemberdayaan swadaya masyarakat dan kelompok pemuda produktif mandiri.

1. Kelompok belajar kesetaraan:

Kejar paket A (setara SD), Kejar paket B (setara SMP), Kejar paket C (setara SMA).

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat kegiatan belajar masyarakat merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, hobi dan bakat warga masyarakat, yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatan program bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungannya.

1. Majelis taklim

Majelis taklim adalah suatu proses pendidikan nonformal yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan sikap hidup terutama yang berhubungan dengan agama islam yang dilaksanakan secara apik dan rapi.

1. Satuan pendidikan sejenis

Satuan pendidikan sejenis adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap yang cakupannya sangat luas. Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam satuan pendidikan yang sejenis adalah:

1. Pra sekolah (kelompok bermain, penitipan anak)
2. Balai latihan dan penyuluhan
3. Kepramukaan
4. Padepokan pencak silat
5. Sanggar kesenian
6. Bengkel/teater
7. Lembaga komunikasi edukatif melalui media massa (cetak dan elektronik
8. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal di Masyarakat

Perkembangan satuan pendidikan nonformal dari kemunculannya hingga saat ini diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat. Satuan pendidikan nonformal yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat terdiri dari lima kategori yaitu:

1. Kejar Paket A, B dan C

Umur peserta kejar berdasarkan kesetaraanya dengan pendidikan persekolahan dibedakan menjadi 2 macam yaitu kejar yang disetarakan dan tidak disetarakan. Maksud dari disetarakan adalah kualitas lulusan, proses belajar mengajar, peralatan yang digunakan, ijazah yang diperoleh, umur peserta setara dengan yang terdapat dipersekolahan.

Menurut Abdulhak (2012: 61) Ditinjau dari segi dana kejar dibedakan menjadi dua yaitu “kejar swadana (kejar paket A, B dan C) dan subsidi pemerintah”. Kejar swadana adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar biayanya dibebankan kepada peserta sedang pemerintah hanya membantu pengadaan buku paket, intensif tutor dan evaluasi akhir serta pengadaan ijazah. Kejar yang disubsidi pemerintah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kejar biayanya berasal dari pemerintah.

Penyelenggaraan kejar berkaitan dengan pemberantasan tuna aksara dan angka, tuna pengetahuan dasar dan tuna bahasa Indonesia. Penyelenggaraan program kejar paket A, paket B serta paket C dihubungkan pula dengan pembinaan dan pengembangan ketrampilan fungsional peserta didik yang berkaitan dengan mata pencaharian.

1. Kelompok Belajar Usaha (KBU)

Pelaksanaan KBU terpadu dan terintegrasi dengan proses bekerja dan berusaha. Pengetahuan dan ketrampilan diperoleh warga belajar dari pelaksanaan pekerjaan dan berusaha. Dana awal bagi KBU berasal dari proyek Dikmas yang penyalurannya melalui SKB dimana dana tersebut merupakan dana bergulir dan SKB sebagai penanggung jawab

1. Kursus-Kursus

Bertitik tolak dari kualitas lulusan pendidikan persekolahan yang belum siap memasuki dunia kerja yang disebabkan minimnya ketrampilan maka kursus merupakan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaannya kursus tersebut dilaksanakan di SKB dengan biaya dibebankan pada anggaran rutin SKB maupun sifatnya proyek , waktu pelaksanaan sore hari, tutor berasal dari lembaga kursus maupun tenaga fungsional SKB.

1. Program Magang

Program magang pada prinsipnya mengikutsertakan warga belajar dalam pusat-pusat kerja (perbengkelan, perusahaan, rumah-rumah industri, dll). Warga belajar dalam magang ini bekerja sambil belajar dalam arti warga belajar mengerjakan segala sesuatu yang dibebankan kepadanya dan sambil mengerjakan pekerjaan tersebut mereka belajar dengan bimbingan pemilik pusat kerja tersebut atau orang lain yang dirujuk. Biaya selama mengikuti program magang dibantu oleh anggaran rutin SKB termasuk intensif pendamping serta bantuan usaha mandiri setelah selesai magang.

1. Program Belajar Mandiri Termasuk didalamnya PKBM

Dalam praktiknya PKBM ada yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat (LSM). Sri Nurlaily dalam Ishak Abdulhak (2012: 63) menyatakan bahwa:

1. PKBM yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan PKBM tersebut dibentuk, dilaksanakan dan dikembangkan oleh masyarakat.
2. PKBM yang dilaksanakan oleh pemerintah (SKB, BPKB, Dinas Pendidikan) peran pemerintah didalamnya sebagai fasilitator (pendamping) yaitu membantu memecahkan permasalahan yang ada terutama dalam hal pemasaran, pencarian mitra kerja dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam hal pembukuan dan administrasi. Pembelajaran dalam PKBM adalah pembelajaran sendiri, saling membelajarkan, belajar bersama, dengan berguru serta magang. Kegiatankegiatan di dalam PKBM adalah semua aktifitas masyarakat baik yang dilakukan perorangan atau kelompok.
3. **Konsep Efektivitas**
4. Pengertian efektivitas

Istilah efektivitas merupakan kata yang sering muncul dalam mempelajari disiplin ilmu administrasi negara. Bagi sebagian orang yang belum memahaminya sering menyamakan istilah efektivitas dengan efisiensi. Efektivitas sendiri didefinisikan oleh para pakar dengan kalimat yang berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini dibahas beberapa definisi efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi.

Chung & Megginson (Siahaan,1999:17) mengemukakan bahwa “efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup)”.

Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya.

Adapun pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat (1995:16) adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Menurut Handayaningrat efektifitas merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono (2000:29) mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut:

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilaipencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Sedangkan Steers (Siahaan, 1999:17) mengungkapkan pendapatnya bahwa:

Organisasi yang efektif adalah iklim organisasi kerja yang kondusif yang mampu membuat pegawainya tidak hanya melaksanakan pekerjaan yang dibebankannya saja, tetapi juga penuh tanggung jawab, bertindak kreatif dan inovatif demi peningkatan efisiensi.

Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan keluaran tanggung jawab dengan sasaran yang harus di capai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai maka dapat dikatakan efektif dan efisien. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

Menurut Gibson dkk (1994:25), efektivitas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : “efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi”. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas individu, merupakan tingkatan efektivitas yang paling dasar yang menekankan pada hasil karya individu atau anggota tertentu dari organisasi.
2. Efektivitas kelompok yang lebih menekankan jumlah kontribusi dari semua anggotanya.
3. Efektivitas organisasi, yang merupakan gabungan dari efektivitas individu dan efektivitas kelompok yang secara sinergis mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatnya.
4. Konsep Efektivitas Program

Ditjen Binlantas Depnaker, (Setiawan,1998) “Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program”. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program.

Bermanfaatkah dan puaskah peserta pelatihan terhadap program pelatihan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi peserta terhadap program pelatihan. Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk “mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 1) Ketepatan sasaran program 2) Sosialisasi program 3) Tujuan program 4) Pemantauan program”. selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

1. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

1. Tujuan program

Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Pemantuan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian/tindak lanjut kepada peserta program.

Mengukur efektivitas program bukanlah suatu hal yang sangat sederhana,karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantungpada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

1. **Pendidikan Kesetaraan**
2. Pengetian Pendidikan Kesetaraan

Program pendidikan kesetaraan melingkupi program kelompok belajarpaket A setara SD/MI, kelompok belajar paket B setara SMP/MTs dan kelompok belajar paket C setara SMA/MA. Kelompok belajar kesetaraan setara SMA/MA merupakan program baru dilingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, karena program ini baru berkembang sekitar tahun 2003.

Pendidikan kesetaraan menurut Kamil (2011: 97) adalah“Program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setaraSD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B,dan paket C”. Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, dan majelis ta’lim, serta satuan pendidikan yangsejenis.

Program pendidikan kesetaraan paket C merupakan program rintisan yang dikembangkan Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, program kesetaraan paket C berada dibawah binaan Direktorat Pendidikan Kesetaraan. Sebagai sebuah program rintisan belum banyak PKBM atau SKB yang mengembangkan program ini.

Acuan pelaksanaan pendidikan kesetaraan program paket A, B, dan C (2004: 4) menyebutkan bahwa tujuan pendidikan kesetaraan adalah:

1. Memfasilitasi pendidikan bagi kelompok masyarakat yang karena keterbatasan social, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografi, tidak dapat bersekolah pada usia sekolah.
2. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengelola sumber daya yang ada dilingkungannya untuk meningkatkan taraf hidupnya.
3. Memberikan kesetaraan akademik: paket A setara dengan SD, Paket B setaradengan SMP, dan Paket C setara dengan SMA, yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan belajar ataupun untuk melamar pekerjaan.

Sasaran program kesetaraan adalah masyarakat lulusan paket B, siswa-siswa lulusan SMP/MTs, serta masyarakat yang telah mengikuti pendidikan informal yang disetarakan. Begitu pula masyarakat yang putus sekolah (drop out) SMA/MA. Prasetyo (2010) mengemukakan tentang “komponen penyelenggaraan pendidikan kesetaraan antara lain warga belajar, tutor, kurikulum, strategi pembelajaran, bahan pembelajaran, dan penilaian”. Hal tersebut kemudian dijelaskan sebagai berikut:

1. Warga belajar

Warga belajar pendidikan kesetaraan umunya sangat beragam atau heterogen, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor geografis dan demografi, ekonomi, sosial budaya dan faktor usia (usia sekolah dan orang dewasa). Terdapat dua kelompok sasaran utama program kesetaraan. Sasaran pertama adalah kelompok wajib belajar yang tidak terjangkau pendidikan formal. Sedangkan sasaran kedua adalah masyarakat umum, orang dewasa yang karena sesuatu dan lain hal tidak berkesempatan memperoleh pendidikan formal.

1. Tutor

Tutor adalah pendidik pada Pendidikan Nonformal (PNF). Tutor adalah guru yang bertugas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keaksaraan. Karena perkembangan psikologis peserta didiknya masih sedemikian dini, maka tugas pendidik lebih bersifat sebagai pengasuh (pamong). Tutor direkrut dari masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan menjadi tutor atau narasumber teknis sesuai kriteria yang ditentukan. Umumnya tutor berasal dari kalangan pendidik akademik, sedangkan narasumber berasal dari berbagai bidang keahlian yang bertugas memberikan bimbingan ketrampilan pratis bagi warga belajar.

1. Kurikulum

Kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanak ansecara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kurikulum program pendidikan kesetaraan menekankan pada kecakapan hidup dan penambahan penghasilan, meliputi:

1. Kurikulum akademik yang setara dengan kompetensi minimal pendidikankasar dan menengah.
2. Kurikulum ketrampilan fungsional dengan penekanan pada kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri dengan membuka lapangan kerja bagidirinya dan bagi sesamanya.

Kurikulum disusun untuk pembelajaran tutorial, mandiri, maupun moduler dengan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dan beban selama satu tahun dapat disesuaikan dengan potensi daerah, kondisi peserta didik dan budaya daerah.

1. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran merupakan suatu serangkaian rencana kegiatan yang termasuk didalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi pembelajaran didalamnya mencakup pendekatan, model, metode dan teknik pembelajaran secara spesifik.

Sistem pembelajaran program kesetaraan berpusat pada kebutuhan dan potensi lokal (berbasis masyarakat) dengan menggunakan bahan belajar hemat biaya, luwes dan memuat menu dengan sajian berbagai pilihan. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sistem modular yang waktu berjalannya berbentuk tutorial, kelompok kecil dan mandiri. Peserta didik harus memahami tujuan kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai, termasuk target waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dan seluruh modul.

1. Bahan Pembelajaran

Bahan Ajar merupakan materi ajar yang dikemas sebagai bahan untuk disajikan dalam proses pembelajaran. Bahan pembelajaran berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasan tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan pembelajaran program kesetaraan berupa modul yang berbasis kompetensi. Modul memuat tujuan, hasil belajar yang diharapkan, kegiatan, latihan dan penilaian. Disajikan secara terintegrasi antara kaidah akademik dan praktek, disesuaikan dengan potensi, kebutuhan nyata dan pengalaman belajar yang sarat dengan kecakapan hidul. Buku teks pelajaran dan modul dipilih oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk digunakan sebagai panduan dan sumber belajar.

1. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun nontes. Penilaian program kesetaraan dapat dilakukan secara mandiri dengan mengerjakan berbagai latihan yang terintegrasi dalam setiap modul, serta penilaian pada akhir setiap bahasan. Tutor dapat melakukan penilaian melalui pengamatan, diskusi, penugasan dan ulangan dalam proses tutorial.

Pengujian secara nasional dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. Program ini dikembangkan sebagai program pendidikan alternatif ataupilihan masyarakat, karena program kesetaraan dikembangkan lebih profesional dan bersaing dengan kualitas pendidikan sekolah (formal). Program kesetaraan dipadukan dengan berbagai jenis ketrampilan yang menjadi pilihan warga belajaratau masyarakat. Program kesetaraan dikembangkan lebih kompetitif, terutama untuk menjawab berbagai keraguan masyarakat terhadap kualitas pendidikan nonformal. Jumlah warga belajar dalam program kesetaraan antara 40 sampai dengan 50 orang.

1. Penyelenggaraan Program kesetaraan

Mendiknas (2008:782) memaparkan proses penyelenggaraan pendidikan kesetaraan meliputi “perencanaan, pelaksanaan, penialaian atau evaluasi, dan pengawasan untuk terlaksananya proses penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang efektif dan efisien”.

1. Perencanaan

Mendiknas (2008:782) memaparkan perencanaan proses pembelajaran meliputi:

Silabus dan rencana pembelajaran (RPP) yang memuat identitas matapelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indicatorpencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasiwaktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penialaian hasil belajar,dan sumber belajar.

Perencanaan proses pembelajaran pedidikan kesetaraan khususnya program kesetaraan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan kesetaraan meliputi:

1. Pembelajaran tatap muka

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif,menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untukberpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatifitas dam kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologi peserta didik.

1. Kegiatan tutorial

Dalam hal ini pendidik mengidentifikasi materi-materi yang sulit bagipeserta didik, membahas materi, memberikan latihan, menggunakan metode dan media pembelajaran, memfasilitasi terjadinya interaksi, melibatkan peserta didik secara aktif dan memberikan balikan sertapenguatan.

1. Kegiatan mandiri

Dalam hal ini peserta didik melaksanakan kegiatan belajar mendiri sesuai dengan kontrak belajar, mengerjakan tugas-tugas, melaporkan kemajuan belajar, menyerahkan portofolio

1. Penilaian atau evaluasi

Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyususnan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Mendiknas (2008: 792) memaparkan bahwa penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik dan terprogram dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis atau lisan dan nontes dalam bentu pengamatan kerja, pengukuran sikap,penilaian hasil karya, proyek/ produk, portofolio dan penilaian diri. Penilaian hasil belajar untuk memperoleh ijazah program paket dilakukan setelah pesertadidik mencapai SKK yang disyaratkan.

Sudjana (2004: 254) memaparkan tujuan penilaian program berfungsi sebagai pengarah kegiatan penilaian dan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kegiatan penilaian program. Anderson (Sudjana, 2004: 254) merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut:

1. Memberi masukan untuk perencanaan program
2. Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan danpenghentian program
3. Memberi masukan utuk keputusan tentang modifikasi program
4. Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat
5. Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian
6. Pengawasan

Mendiknas (2008: 792) memeaparkan bahwa “dalam pengawasan pendidikan kesetaraan terdapat beberapa kegiatan, yaitu: a) Pemantauan, b) Supervisi”. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pemantauan

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penialain hasil pembelajaran. Pemantauan dilkaukan dengancara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancaradan dokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh penyelenggara program, penilik dan atau dinas kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.

1. Supervisi

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penialain hasil pembelajaran. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan dan konsultasi. Kegiatan supervise dilakukan oleh penyelenggara program, penilik, dan atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.

1. **Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)**

Kamil (2011: 114) memaparkan beberapa penjelasan mengenai pengelolaan SKB, diantaranya:

1) Pengelolaan sumber daya manusia, 2) Beberapa strategi pengembangan pengelola SKB, 3) Pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan SKB, 4) Strategi pengelolaan SKB, 5) partisipasi warga belajar dalam pengelolaan pembelajaran SKB

Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya manusia

Kamil (2011: 115) menyatakan bahwa “pengelola SKB akan mampu menyusun strategi yang ampuh terutamadalam rangka mengatasi setiap perubahan yang terjadi apabila didukung fungsi manajerial yang tangguh”.

Salah satu bidang fungsional strategis yang harus menjadi perhatian pengelola adalah manajemen sumber daya manusia. Untuk mencapai itudiperlukan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelolanya sehingga program yang dikembangkan SKB efektif dan efisien. Disamping itu pula dibutuhkan tenaga sumber daya yang berkualitas dan memiliki kompetensi tinggi agar pengelolaan yang dikembangkan tetap terjaga sesuai dengan perubahan.

1. Beberapa strategi pengembangan pengelola SKB

Kamil (2011: 116) menjelaskan bahwa jika SKB ingin berkembang menjadi sebuah SKB yang professional dan berorientasi ke depan,maka perlu dikembangkan beberapa strategi, diantaranya:

1. Strategi rekruitmen dan seleksi

Strategi rekruitmen dan seleksi pada SKB sangat bergantung pada faktor-faktor berikut:

1. Tipe pengelola yang dibutuhkan
2. Jumlah anggaran yang tersedia untuk rekruitmen
3. Tujuan SKB
4. Kewajiban tindakan persetujuan
5. Strategi pelatihan dan pengembangan

Pemilihan strategi pelatihan dan pengembangan spesifik dapat meliputi faktor-faktor seperti:

1. Kaliber dalan level keahlian staf SKB yang dibutuhkan
2. Bagaimana hasil pelatihan pengelola san staf dapat mengikuti perubahan program
3. Perubahan organisasi SKB
4. Bagaimana pemahaman staf terhadap filosofi manajemen puncak.
5. Strategi penilaian kerja

Startegi penilaian kinerja sangat tergantung kepada tingkat permasalahan yang dialami organisasi SKB, baik permasalahan kinerja staf SKB, pengelola SKB dantingkat kemampuan kontrol program dari masing-masing penanggungjawab program.

1. Strategi kompensasi

Agar SKB berkembang lebih professional dan mampu bersaing secara kompetitif, harus menekankan pada kompetensi individual dan kreatifitas serta menggunakan rencana honor/ gaji yang didasarkan atas pengetahuan atau keahlian.

1. Strategi manajemen staf/ karyawan

Strategi ini dapat dilakukan melalui:

1. Penetapan kebijakan yang jelas terhadap staf dan pengelola terutama tentang tugas dan tanggung jawabnya
2. Menekankan kreatifitas dan proaktif terhadap pengembangan program dan masalah, serta disiplin yang tinggi sesuai dengan upah yang diberikan.
3. Pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan SKB

Ketua SKB yang secara teratur melakukan proses pengembangan strategi sumber daya manusia pada organisasinya akan memperoleh manfaat berupa *distinctive capability* dalam beberapa hal dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan. Kamil (2011: 117) menjelaskan beberapa hal yang dapat mendukung kegiatan tersebut, yaitu:

1. Kemampuan mendefinisikan kesempatan maupun ancaman bagi sumber dayamanusia dalam mencapai tujuan SKB
2. Dapat memacu pemikiran baru dalam memandang isu-isu sumber dayamanusia dengan orientasi dan mendidik partisipan serta menyajikanperluasan perspektif
3. Menguji komitmen manajemen terhadap tindakan yang dilakukan sehinggadapat menciptakan proses bagi alokasi sumber daya pada aktifitas programSKB yang spesifik
4. Mengembangkan *sense or urgency* dan komitmen untuk bertindak
5. Fokus strategic pada tindakan yang memiliki prioritas jangka panjang dalammengelola fungsi sumber daya manusia dan mengembangkan kemampuanserta bakat staf.
6. Strategi pengelolaan organisasi SKB
7. Perencanaan

Kamil (2011: 118) mengemukakan bahwa perencanaan program kegiatan yang komprehensif, yaitu perencanaan program yang mampu mengantisipasi kebutuhan yang bervariasi dan luas, untuk jangka panjang, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dan paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan program.

1. Pengorganisasian

Apabila perencanaan telah dilakukan maka pengorganisasian mutlak dilakukan. Pengorganisasian menurut Kamil (2011: 119) adalah kegiatan mengidentifikasi dan memadukan sumber-sumber yang diperlukan kedalam kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Pergerakan

Selama perencanaan dan pengorganisasian dilakukan, penggerakan memainkan peranan yang sangat penting. Fungsi penggerakan menurut Kamil (2011:120) adalah “untuk mewujudkan tingkat penampilan dan partisipasi yang tinggi dari setiap pelaksana yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

1. Pembinaan

Fungsi manajemen lainya adalah pembinaan, pembinaan merupakan salah satu unsur yang perlu dalam mengelola atau mengorganisir SKB khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang dikembangkannya. Sudjana (2004: 157) menyatakan bahwa “didalam pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari yang telah direncanakan”.

1. Pengawasan

Kamil (2011: 123) menjelaskan langkah-langkah pengawasanyang dapat dilakukan penyelenggara dalam pengembangan program SKB, dapatdilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tolok ukur
2. Mengukur penampilan pelaksana program
3. Membandingkan penampilan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
4. Memperbaiki kegiatan apabila dipandang perlu.
5. Supervisi

Fungsi supervisi dalam pembinaan SKB sangat bekaitan dengan pengamatan dan pemberi bantuan. Pengamatan biasanya dilakukan untukmendapatkan gambaran yang jelas dan objektif tentang pelaksanaan program pendidikan. Sedangkan pemberian bantuan bertujuan agar pihak yang disupervisi dapat memperbaiki kegiatan dan komponen program yang tidak sesuai serta agar pelaksana program dapat meingkatkan kegiatan yang telah dianggap baik.

1. Monitoring

Monitoring pada umumnya dilakukan baik pada waktu sebelum kegiatan pembinaan maupun bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pembinaan. Menurut Kamil (2011: 124) bahwa:

Monitoring dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaanya secaramantap, teratur dan terus menerus dengan cara mendengar, melihat danmengamati, dan mencatat keadaan serta perkembangan program tersebut.

1. Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap seluruh atau sebagian komponen dan pelaksanaan program SKB. Penialaian dapat diselenggarakan secara terus menerus, berkala dan sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang atau setelah program dilaksanakan.

Dalam pengelolaan SKB, salah satu komponen yang harus diperhatikan dan mendukung terhadap berhasilnya pengelolaan program adalah terjadinya proses pembelajaran. Komponen proses pembelajaran meliputi: komponen warga belajar, tutor, fasilitator, serta komponen materi pelajaran yang adalah modul dan buku paket.

1. Partisipasi warga belajar dalam pengelolaann pembelajaran SKB

Indikator keberhasilan pengelolaan pembelajaran terutama sebagai sebuah strategi dalam rangka mencapai tujuan dan keberhasilan pembelajarn,baik secara individual maupun kelompok adalah adanya keterlibatan emosi dan mental warga belajar dalam kegiatan pengelolaan pembelajaran.

Anwar (Kamil, 2011: 132) memaparkan beberapa keuntungan yang dapat diambil dari partisipasi warga belajar dalam pengelolaanpembelajaran, yaitu:

1. Hasil belajar menjadi lebih tinggi
2. Kualitas belajar menjadi lebih baik
3. Motivasi berprestasi tinggi
4. Penerimaan perasaan akibat pembelajaran
5. Harga diri menjadi lebih tinggi
6. Meningkatkan kerjasama
7. Keinginan mencapai tujuan menjadi besar
8. Memperkecil *turn over*
9. Tingkat ketidak hadiran menjadi rendah
10. Komunikasi belajar dan bekerja menjadi lebih baik

Beragam satuan pendidikan nonformal termasuk pula didalamnya SKB, harus menghadapi berbagai hambatan terkait dengan kinerja kerja program-program yang dijalankan di dalamnya. Sihombing (2000) menjelaskan berbagai hambatan pendidikan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perkembangan program belum diimbangi jumlah dan mutu yang memadai. Misalnya, pemilik Dikmas masih ada beberapa yang menangani lebih dari satu kecamatan, dan dari kecamatan yang ada belum seluruhnya memiliki penilik Dikmas. Demikan pula dengan kebutuhan akan tutor, sebagai contoh seharusnya setiap kelompok belajar membutuhkan rata-rata delapan orang tutor, kenyataannya dilapangan baru dipenuhi rata-rata lima orang tutor untuk setiap kelompok belajar.
2. Ratio modul untuk warga belajar program kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C) masih jauh dari mencukupi. Pada kenyataannya, ratio modul baru mencapai 1 : 3 (satu set modul untuk tiga orang warga belajar). Hal ini terjadi karena pengadaan modul murni dari pemerintah.
3. Tidak ada tempat belajar yang pasti. Hal ini menyebabkan adanya kesukaran pemantauan kebenaran pelaksanaan program pembelajaran.
4. Kualitas hasil pembelajaran sulit dilihat kebenarannya dan sukar diukur tingkat keberhasilannya. Hal ini terjadi karena pemerintah di dalam melaksanakan pembelajaran bisa dimana saja dan akan terjadi seperti apa yang ditulis di atas kertas. Secara teoritis memang benar, tetapi dala pelaksanaannya sulit dipertanggung jawabkan.
5. Lemahnya akurasi data atau informasi tentang sasaran program. Kondisi ini disebabkan terbatasnya tenaga lapangan baik kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukungnya yang belum memadai.
6. Jadwal pelaksanaan belajar mengajar yang tidak selalu dapat dilaksanakan tepat waktu.
7. **Kerangka Pikir**

Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan seakan tidakkan pernah berhenti, banyak agenda reformasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Beragam program inovatif pun seakan bermunculan untuk dapat ikut serta dalam memeriahkan reformasi pendidikan diantaranya baik melalui jalur pendidikan formal, informal dan nonformal.

Pendidikan nonformal yang saat ini disebut juga pendidikan luar sekolah (PLS), merupakan salah satu jalur pendidikan yang menjadi acuan disamping pendidikan formal. Berdasarkan latar belakang adanya *life long educational program* yang merupakan program pendidikan seumur hidup yang pada intinya menekankan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar, dan berdasarkan pada isi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan luar sekolah akan membawa implikasi terhadap SKB sebagai salah satu unit pelaksana teknis pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.

SKB Masohi di wilayah kabupaten Maluku Tengah, Maluku merupakan salah satu SKB yang menjadi lembaga pendidikan luar sekolah yang memiliki peranan penting diwilayah kerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, urgensi keberadaan SKB Masohi ditandai oleh beberapa kondisi diantaranya: penyesuaian prioritas calon warga belajar oleh SKB, dan adanya pengikraran ijazah sebagai penentu dari peningkatan kualitas hidup masyarakat oleh pasar.

Beragam program dikembangkan oleh SKB Masohi, salah satunya program kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C). Program kesetaraan merupakan salah satu dari sekian komponen pendidikan masyarakat yang dimiliki oleh SKB. Terkait dengan pembahasan seputar keberadaan ijazah sebagai tuntutan pasar, adapun program yang dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah program kesetaraan paket C.

Untuk lebih jelas akan diuraikan melalui bagan kerangka piker sebagai berikut:

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Masohi

Pendidikan Kesetaraan

Proses Penyelenggaraan Program kesetaraan

Efektivitas Penyelenggaraan program kesetaran

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Efektivitas Penyelenggaraan Program Kesetaraan di SKB Masohi Kbupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku